

## **ARAH DAN TANTANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING PROFESIONAL: PROPOSISI HISTORIK- FUTURISTIK**

### **Abstrak**

Perkembangan bimbingan dan konseling berentang dari persoalan epistemologi sampai kepada profesionalisasi. Tulisan ini mengangkat proposisi historik dan futuristik bimbingan dan konseling, terutama dalam seting pendidikan sekolah, yang mencakup: (1) bimbingan dan konseling abad 20; (2) bimbingan dan konseling memasuki abad 21; (3) langkah-langkah penegasan identitas profesi; (4) model identitas profesional bimbingan dan konseling.

### **Teori dan Pengalaman Praktek Abad 20**

Sepanjang catatan sejarah, perkembangan bimbingan dan konseling diawali dengan upaya Frank Parson (1908) di Amerika Serikat, yang dijuluki sebagai *Bapak Bimbingan*, dalam membantu para remaja lulusan sekolah memilih dan memasuki pekerjaan. Gerakan bimbingan dan konseling dimulai dari seting masyarakat, merupakan bagian dari *Gerakan Progresif* yang menyangkut reformasi kehidupan sosial dan hak asasi, dan salah satu kepeduliannya terletak pada kesejahteraan dan perkembangan anak.

Gerakan Progresif ini mendorong munculnya *Gerakan Pendidikan Progresif*, yang dipelopori oleh John Dewey (1916) yang memposisikan “perkembangan sebagai tujuan pendidikan”. Dewey memandang adanya hirarki perkembangan kognitif anak, dan pendidikan diartikan sebagai upaya menyiapkan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan anak. Pendidikan, jelasnya sekolah, bertanggungjawab dalam pengembangan kognitif, pribadi, sosial, dan moral anak. Kebermaknaan pendidikan harus dilihat dari sejauh mana sekolah menciptakan lingkungan yang mampu mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan dan menyiapkan pengalaman untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Hasil dari gerakan Dewey ini adalah diinkorporasikannya bimbingan dan konseling ke dalam kurikulum untuk mendukung perkembangan siswa. Pikiran John Dewey ini telah mempengaruhi pemikiran Piaget (1952) tentang teori perkembangan kognitif, dan Kohlberg tentang teori perkembangan moral.

Upaya studi perbedaan individual dan psikometrika yang dilakukan Alfred Binet, paska Perang Dunia I, yang memperkenalkan tes inteligensi telah mendorong penggunaan tes secara luas di dalam bimbingan dan konseling sekolah. Penggunaan tes secara meluas ini telah menempatkan konselor sebagai orang yang bertanggung jawab, berminat, dan mampu “mengetahui” setiap anak dan mengintegrasikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan ke dalam program yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pada tahun 1930 Edmund Griffith Williamson memperluas gerakan Parson dan melahirkan teori pertama tentang bimbingan dan konseling yang dikenal dengan teori “*trait and factor*”. Teori ini dikenal dengan pendekatan direktif atau *counselor-centered* di dalam konseling sekolah. Dalam pendekatan ini tugas konselor sekolah menyiapkan informasi untuk memotivasi dan mengarahkan siswa. Teori ini menekankan perkembangan sebagai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai tujuan bimbingan dan konseling, dan melihat pentingnya “*person-environment interaction or fit*”. Teori ini menekankan keharusan konselor untuk memahami dan mengapresiasi kemungkinan pengaruh situasi sosial, pendidikan, dan pekerjaan terhadap siswa.

Pada tahun 1940, Carl R. Rogers yang disebut sebagai “Bapak Konseling” merupakan orang pertama yang memperkenalkan pendekatan nonmedis dalam bimbingan dan konseling. Pandangan Rogers banyak mempengaruhi perkembangan profesi konseling dan pendekatan konseling moderen. Gerakannya yang berorientasi humansitik merupakan reaksi terhadap

ARAH DAN TANTANGAN

pendekatan direktif (Williamson) dan psikoanalitik (Freud) yang dianggapnya dua pendekatan mekanistik-reduksionistik. Aliran Rogers disebut juga “kekuatan ketiga” setelah aliran psikoanalitik dan behavioristik. Tugas dan tanggung jawab konselor menurut aliran Rogers adalah meng-empati dunia pengalaman klien, mengembangkan lingkungan yang mendorong tumbuhnya aktualisasi diri, membantu mengembangkan kecakapan klien dalam memecahkan masalah saat ini dan pada saat yang akan datang. Konselor menjadi orang yang menyertai klien menjelajahi penemuan diri. Pengaruh besar Rogers terhadap pekerjaan konselor adalah konseptualisasi klien sebagai “orang daripada sebagai masalah”. Mengiringi kajiannya ini, Rogers dianggap orang pertama yang memberikan pengaruh penggunaan istilah konseling sebagai pengganti istilah bimbingan, dan bimbingan berada di dalamnya.

Upaya memperkuat identitas profesi konseling di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1952 setelah lahirnya asosiasi konselor yang disebut *American School Counselor Association* (ASCA), melalui upaya-upaya pengembangan profesional, riset, dan advokasi promosi identitas profesi. Upaya penyiapan konselor profesional dimulai melalui pendidikan khusus, penekanan latihan kepada keterampilan konseling perorangan dan layanan bimbingan dan konseling yang mencakup: pengumpulan data, informasi, penempatan, tindak lanjut, dan evaluasi.

Pada tahun 1962 di Amerika Serikat terjadi sebuah studi berskala besar dan nasional yang dipimpin oleh Gilbert Wrenn, berkenaan dengan peran dan fungsi konselor. Laporan studi yang diberi judul *The Counselor in Changing World*, menekankan tujuan bimbingan dan konseling terletak pada perkembangan siswa secara holistik, termasuk di dalamnya layanan remediatif sebagai layanan yang sudah eksis saat itu. Konselor direkomendasikan menggunakan berbagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa secara komprehensif. Bagi Wrenn komitmen konseling terletak pada memfasilitasi perkembangan siswa, dan konselor harus aktif menciptakan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang responsif dan fasilitatif terhadap perkembangan siswa.

Pada dekade yang sama, di Indonesia mulai tumbuh dan dikenal layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Fokus layanan lebih ditekankan kepada penanganan perilaku bermasalah siswa terutama yang menyangkut perilaku disiplin sekolah. Bimbingan dan Konseling dilakukan secara sporadik, oleh guru yang tanpa latar belakang bimbingan dan konseling. Upaya mempersiapkan dan memenuhi tenaga profesional di bidang bimbingan dan konseling dilakukan dengan membuka jurusan Guidance And Counseling (Bimbingan dan Penyuluhan) di UPI (IKIP Bandung saat itu) pada tahun 1964 yang dibidani oleh Dr. Mochtar Buchori, M.Ed. Penyiapan tenaga ahli dan profesional dalam bimbingan dan konseling dikembangkan terus dengan dibukanya Lembaga Pendidikan Post Doktoral IKIP Bandung pada tahun 70-an, yang kini berkembang menjadi Program Pasca Sarjana. Program ini menyiapkan para calon Magister dan Doktor Bimbingan dan Konseling, dan berlangsung sampai saat ini. Upaya penyiapan tenaga profesional dilakukan juga melalui Pendidikan Profesi Konselor, yang mulai dirintis oleh Universitas Negeri Padang sejak tahun 1999/2000. Sertifikasi penggunaan tes bagi para konselor telah diawali pada tahun 1995, kerjasama antara Ditjen Dikdasmen, Universitas Negeri Malang (IKIP Malang ketika itu), dan ABKIN (IPBI saat itu). Sesungguhnya pada tahun 1986/87 upaya yang sama telah dimulai di IKIP Bandung (UPI).

Inkorporasi Bimbingan dan Konseling ke dalam sistem pendidikan di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 1975, berbarengan dengan lahirnya Kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini bimbingan dan konseling (sebutannya Bimbingan dan Penyuluhan) menjadi bagian terpadu dari program dan layanan pendidikan sekolah. Pada tahun yang sama lahir Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), sebuah organisasi profesi yang mengemban tugas untuk melakukan upaya profesionalisasi bimbingan dan konseling. IPBI telah banyak berkiprah dalam percaturan Bimbingan dan Konseling Indonesia. Berbagai peraturan dan

ARAH DAN TANTANGAN

ketentuan, serta model bimbingan dan konseling yang berlaku di sekolah dewasa ini merupakan bagian dari prestasi IPBI selama 25 tahun terakhir di abad 20.

Pada tahun 1984 diberlakukan kurikulum baru, dan bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan dengan lebih menonjolkan layanan bimbingan karir sehingga namanya berubah menjadi Bimbingan Karir. Perubahan ini tampaknya lebih didasari pemikiran bahwa bimbingan karir sebagai inti atau identitas utama dari bimbingan dan konseling sekolah. Namun pada tahun 1994, seiring dengan diberlakukannya Kurikulum 1994, Bimbingan Karir kembali berubah menjadi Bimbingan dan Konseling, sampai saat ini.

Pada dekade yang sama (kurun waktu 60-an sampai 80-an) di Amerika Serikat terjadi perkembangan bimbingan dan konseling yang semakin memperkuat perspektif perkembangan dalam bimbingan dan konseling. Gerakan civil right, gender, dan anti perang Vietnam pada tahun 60-an telah mendorong munculnya gerakan kesehatan mental masyarakat. Gerakan kesehatan mental ini secara bertahap menggeser tanggung jawab utama pekerjaan psikiatrik dan rumah sakit jiwa untuk identifikasi, treatment, dan pencegahan kesehatan mental menjadi tanggung jawab pusat-pusat kesehatan mental masyarakat.

Pada tahun 1975 terjadi perluasan layanan bimbingan dan konseling pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak berkelainan (berkebutuhan khusus). Layanan ini mencakup penempatan, kolaborasi pembelajaran individual, manajemen record anak, konsultasi dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus, orang tua, pengasuh, dan guru.

Pendekatan kesehatan mental masyarakat ini cenderung mulai meminimalisasi penggunaan istilah-istilah gangguan mental (mental disease), dan memandang disfungsi psikologis bukan sebagai akibat gangguan kepribadian, melainkan lebih sebagai respon salah suai terhadap situasi yang menuntut pemecahan praktis. Pendekatan ini berfokus pada membantu individu hidup dalam masyarakat dan memecahkan masalah hidup sehari-hari. Fungsi preventif dalam pendekatan ini mulai mendapat tempat lebih penting bagi kesejahteraan manusia, dan menjadi *sistem nilai baru* dari pekerjaan bimbingan dan konseling.

Kepedulian bimbingan dan konseling tidak semata-mata terletak pada peristiwa yang terjadi pada diri klien, melainkan juga mencakup masalah dan sumber-sumber yang melekat pada lingkungan klien, seperti perumahan, pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kenyamanan fisik. Gerakan ini telah mendekatkan konseling dengan kesehatan masyarakat dan mendorong lahirnya pendekatan yang disebut dengan pendekatan ekologis (*ecological approach*). (Dianjurkan baca: Sunaryo Kartadinata, 1996). ***Gerakan ini telah mendorong tumbuhnya layanan bimbingan dan konseling dalam seting masyarakat luas, dan tidak terbatas kepada lingkungan sekolah.***

Pada dekade ini penekanan perkembangan sebagai tujuan utama bimbingan dan konseling semakin kokoh. Keyakinan dasar bimbingan dan konseling perkembangan ini ditegaskan Fassinger & Schlossberg (1992 dalam Leona Tyler, 1999) bahwa:

*Inherent in our philosophy is a nonpathological focus on normalcy, and day-to-day problems of living an emphasis on strenght and adaptive strategies in our clients... We see ourselves as educators, we emphasize the empowerment of individuals, we value preventive as well as ameliorative intervention efforts, and we work for enhanced functioning in all people...*

*Our scope includes environmental as well as individual intervention... the effective use of community resources and social and political advocacy where appropriate... We emphasize developmental approaches to working with people including attention to their sociocultural context and the influence of gender, race, ethnicity, sexual orientation, (dis)ability and socio-history. These characteristics give us the unique oportunity to be in the forefront...of effective service delivery.*

ARAH DAN TANTANGAN

Pernyataan ini merupakan puncak sejarah perkembangan dunia psikologi konseling dan terapi, terutama konseling perkembangan. Konseling perkembangan adalah psikoterapi yang mengkombinasikan pendekatan perkembangan dan ekologis. Pendekatan ini menyiapkan kerangka kerja dan pemikiran konseling yang dibangun atas pandangan potensi positif manusia untuk tumbuh, mencapai dan mengembangkan kompetensi untuk menghadapi persoalan dan tantangan dalam seluruh lingkaran kehidupan.

### **Memasuki Abad 21: Tantangan dan Agenda**

Pemikiran bimbingan dan konseling perkembangan pada dua atau tiga dekade terakhir di abad 20 mendorong pemikiran tentang model-model penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan. Model bimbingan dan konseling yang masuk ke dalam sistem pendidikan Indonesia pada tahun 1975 diwarnai pemikiran ASCA pada tahun 1952 ketika dicanangkan konselor sekolah profesional. Model ini menekankan kepada layanan pengumpulan data, informasi, penempatan, tindak lanjut, dan evaluasi.

Pada dekade 70an dan 80-an model ini telah berkembang jauh, walaupun kegiatan layanan itu masih ada di dalamnya, ke arah model penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang terstruktur dan terorganisasikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor isi, pengorganisasian, dan sumber daya (manusia, finansial, politik). Ada tiga model penyelenggaraan yang bisa diidentifikasi, yaitu:

1. Model perkembangan dari Myrick (Norman C. Gysber, 2001) yang menekankan:
  - a. Fokus program bagi seluruh siswa
  - b. Mengetahui adanya kurikulum bimbingan yang harus diorganisasikan, dirancang, sekuensial, dan fleksible
  - c. Perlunya pendekatan terpadu dalam implementasi yang melibatkan seluruh personil sekolah
2. Model yang dikembangkan oleh Johnson and Johnson tahun 80-an yang disebut dengan model *competency-based guidance*. Model ini dikatakan sebagai “ *a total pupil services program developed with the students as the primary client*”. (Norman C. Gysber, 2001)
3. Model perkembangan yang disempurnakan oleh Gysbers dan Henderson (2000) yang menekankan kepada struktur pengorganisasian penyelenggaraan yang mencakup:
  - a. Isi yang menggambarkan kompetensi yang ingin dicapai
  - b. Kerangka kerja, menggambarkan komponen *struktural* dan program yang dialokasikan ke dalam komponen: kurikulum bimbingan, perencanaan individual, layanan responsif, dan pendukung sistem
  - c. Sumber daya, mencakup manusia, finansial, dan sosiokultural dan politik

Pada tahun 1996-1999 di Indonesia terjadi studi yang dilakukan Sunaryo Kartadinata dan tim tentang *Quality Improvement and Management System Development of School Guidance and Counseling Services*. Penelitian ini adalah grant kepada PPS UPI yang dibiayai oleh *University Research for Graduate Education (URGE)*. Studi ini merekomendasikan bahwa model bimbingan dan konseling perkembangan (komprehensif) merupakan model yang cukup efektif dan mampu memperbaiki mutu layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Model ini memiliki kelayakan untuk diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, termasuk dalam setting pendidikan khusus. (Sunaryo Kartadinata dan Tim, 1999). Sejak tahun 1998 model ini telah diperkenalkan kepada para konselor melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan baik dilaksanakan interen sekolah maupun dalam bentuk kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan perkembangan bimbingan dan konseling, pengakuan legal atas eksistensi konselor di Indonesia terjadi dengan ditetapkannya UU No. 20/2003 tentang

ARAH DAN TANTANGAN

Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 1 ayat (6) dinyatakan bahwa konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Pengakuan legal atas eksistensi konselor dalam Sistem Pendidikan Nasional merupakan prestasi puncak dalam sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Sebagai asosiasi profesi, ABKIN ingin menegaskan dan mendeklarasikan bahwa *konselor adalah pendidik*, dan layanan profesional yang dilakukan oleh konselor adalah *bimbingan dan konseling*.

Sejalan dengan pengakuan legal atas eksistensi konselor, upaya-upaya profesionalisasi bimbingan dan konseling dilakukan terus oleh ABKIN. Konvensi Nasional Bimbingan dan Konseling ke XIII tahun 2003, dan Konvensi Divisi-Divisi ABKIN tahun 2004 merekomendasikan langkah lanjut profesionalisasi bimbingan dan konseling melalui standarisasi profesi. Standarisasi tidak hanya secara nasional tetapi juga ke arah standar internasional, yang mencakup etik, akreditasi/sertifikasi, dan kredensialisasi. Secara konkret upaya standarisasi ini diawali pada tahun 2002, dengan pengembangan Dasar Standarisasi Profesi Konseling Indonesia, sebagai hasil kerjasama antara ABKIN dengan Ditjen Dikti. Standar ini masih terus dikaji dan dikembangkan untuk penyempurnaan.

Dengan menengok masa lalu dan menatap ke depan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam upaya membangun dan mempertegas bimbingan dan konseling profesional pada abad 21. Kecenderungan ini terjadi juga di Amerika Serikat (Norman C. Gysber, 2001). Beberapa hal yang patut menjadi perhatian serius dalam mengembangkan bimbingan dan konseling profesional di era abad 21 adalah:

#### ***Kebutuhan akan kejelasan tujuan dan misi***

Satu hal yang dapat diangkat dari reviu masa lalu ialah adanya keberlanjutan dan keberagaman di dalam melihat tujuan dan cara memahami bimbingan dan konseling, walau pada saat paling awal sekalipun ketika gerakan bimbingan berfokus pada bimbingan vokasional. Perbedaan pemahaman yang muncul karena pemaknaan secara individual maupun tantangan sosial berpengaruh pada kondisi saat ini tentang bagaimana para pelaksana dan pengambil kebijakan memahami bimbingan dan konseling. Apa yang bisa diperbuat untuk masa kini dan masa yang akan datang? Ini akan menyangkut persoalan konflik yang dihadapi konselor dalam merespons perbedaan harapan yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman makna dan tujuan bimbingan dan konseling. Ini juga yang mendorong terjadinya tindakan fragmentaris dari konselor, apakah penekanan pada persoalan karir, kesehatan mental, pendidikan, atau yang lainnya.

Memperhatikan berbagai kemungkinan tersebut, adalah sudah menjadi kebutuhan bagi sebuah profesi, termasuk profesi bimbingan dan konseling, melakukan kolaborasi dengan bidang-bidang atau profesi lain di dalam dan di luar pendidikan; mendiskusikan tujuan dan misi bimbingan dan konseling abad 21. ABKIN sebagai asosiasi profesi harus tampil mengambil peran kepemimpinan dalam menangani tugas yang penting dan strategis ini baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Di mana posisi bimbingan dan konseling pada abad 21. Bukanlah hal baru bahwa bimbingan dan konseling dinyatakan sebagi bagian terpadu dari pendidikan. Secara formal dalam berbagai dokumen yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan hal itu telah digariskan, namun dalam praktek seringkali bimbingan dan konseling ditempatkan sebagai pelengkap. Myers (1920) dan Payne (1923) telah menegaskan bahwa bimbingan dan konseling adalah bagian integral dari pendidikan. Kini sudah saatnya dilakukan ***penegasan ulang bahwa bimbingan dan konseling adalah bagian terpadu dri pendidikan; dan kini saatnya pula untuk meletakkan prinsip kebijaksanaan itu di dalam praktek.***

#### ***Kebutuhan akan kerangka kerja bimbingan dan konseling komprehensif***

ARAH DAN TANTANGAN

Perkembangan model penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang dicapai pada akhir abad 20 telah menunjukkan identitas profesi yang semakin kokoh. Model bimbingan dan konseling (perkembangan) komprehensif adalah model yang memposisikan konselor untuk menaruh perhatian penuh kepada seluruh siswa, bekerja bersama dengan orangtua, guru, administrator, dan stakeholder lainnya. Riset yang berbasis pada model komprehensif memberikan penguatan untuk dikokohkannya model ini sebagai model bimbingan dan konseling sekolah, namun masih belum tersosialisasikan kepada seluruh sekolah dan belum menjadi kebijakan nasional; substansi bimbingan dan konseling masih memerlukan pengembangan. Arah perkembangan ini perlu ditindaklanjuti dan ditegaskan dalam agenda abad 21.

#### ***Kebutuhan akan akuntabilitas***

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggung jawaban atas hasil yang harus dicapai oleh layanan/program yang ditawarkan. Fokus akuntabilitas bimbingan dan konseling pada dewasa ini terletak pada prestasi akademik, perkembangan pribadi/sosial dan karir. Prinsip ini mengandung arti bahwa rumusan perilaku yang hendak dicapai, sistem intervensi psikoedukatif, dan asesmen merupakan komponen yang terkait dengan akuntabilitas bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling perkembangan komprehensif adalah model yang berbasis pada program terstruktur yang memungkinkan konselor dapat mengakses hasil bimbingan dan konseling dalam wujud perkembangan perilaku. Model yang dihasilkan dari studi Sunaryo Kartadinata dan Tim (1999), Sunaryo Kartadinata dan Tim (2003), dan ABKIN (2004) memberikan dasar empirik bagi pengokohan identitas dan wilayah garapan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan. Model ini menginkorporasikan perilaku-perilaku yang dikembangkan melalui layanan bimbingan dan konseling kedalam perilaku yang juga harus dicapai dalam proses pembelajaran bidang studi, dan sebaliknya. Inkorporasi semacam ini akan menempatkan bimbingan dan konseling berkontribusi signifikan terhadap perkembangan akademik, pribadi-sosial, dan karir siswa.

#### ***Kebutuhan advokasi***

Cukup lama berlangsung pandangan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk memperbaiki penyakit sosial atau perilaku-perilaku salah suai. Langkah sistematis yang diawali pada tahun 1975 untuk menempatkan bimbingan dan konseling dalam posisi yang lebih jelas, dan dibentuknya organisasi profesi yang bertugas mengurus profesi, menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling telah secara aktif ambil bagian secara lebih nyata di dalam kehidupan sosial dan pendidikan di Indonesia; di dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pendidikan secara nasional.

Atas dasar hal tersebut cukup alasan dan rasional bahwa sebagai sebuah profesi, bimbingan dan konseling memiliki kebutuhan advokasi yang dapat dinyatakan dalam keterlibatan secara aktif di dalam reformasi pendidikan, sosial, dan pekerjaan, terutama dalam bidang-bidang reformasi yang memerlukan kepakaran konselor. Sebuah profesi harus menghindari kondisi yang oleh Haley (1969 dalam Gysber, 2001) disebut sebagai "*the five Be's*) yaitu: "*be passive, be inactive, be reflective, be silent, beware*".

#### ***Kebutuhan melayani semua siswa***

Sejarah menunjukkan bahwa tiga dekade terakhir pada abad 20 program bimbingan dan konseling dirancang untuk melayani semua siswa. Walaupun kebutuhan yang mendesak dan krisis dalam mengangai siswa masuk ke dalam program layanan, namun fokus utama dari bimbingan dan konseling (perkembangan) adalah menyiapkan pengalaman bagi seluruh siswa untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Tujuan ini didasarkan kepada asumsi bahwa seluruh siswa dapat dan harus mengambil manfaat dari aktivitas dan layanan

ARAH DAN TANTANGAN

bimbingan dan konseling komprehensif untuk memfasilitasi perkembangan akademik, pribadi-sosial, dan karir.

Apa yang dimaksud melayani seluruh siswa saat ini? Ini berarti bahwa program bimbingan dan konseling komprehensif melayani siswa, orangtua, guru, dan stakeholder lain secara seimbang tanpa membedakan jender, ras, etnik, latar belakang budaya, disabilitas, struktur keluarga, dan status ekonomi. Ini adalah pemahaman latarbelakang kultural, sosiologis, psikologis, ekonomi, dan keluarga. Pendekatan multikultural memberi makna bagi keseimbangan layanan bagi semua siswa, dan berlangsung dalam lingkungan budaya yang oleh Padersen (19...) disebut sebagai kultur inklusif. Dalam konteks persekolahan kultur inklusif ini harus tampak dalam kultur dan layanan sekolah yang mampu mengakomodasi dan memfasilitasi perkembangan anak dari berbagai latar belakang dan kemampuan. Pendidikan inklusif yang pada awal abad 21 ini dicanangkan di Indonesia menuntut layanan bimbingan dan konseling memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus di dalam setting pendidikan reguler, menyiapkan diversifikasi layanan sesuai dengan kebutuhan siswa.

### ***Visi Bimbingan dan Konseling***

Visi bimbingan dan konseling abad 21 harus diletakkan pada pelaksanaan sepenuhnya bimbingan dan konseling komprehensif di semua sekolah, melayani semua siswa dan orangtuanya, serta melibatkan konselor secara aktif. Apabila bimbingan dan konseling dikonseptualisasikan, diorganisasikan, dan diimplementasikan sebagai program, akan menempatkan konselor secara konseptual dan struktural sebagai pusat layanan pendidikan dan akan menjadikan bimbingan dan konseling aktif dan terlibat. Artinya, bimbingan dan konseling menjadi program terpadu dan transformatif, bukan program yang marginal dan suplemental. Inilah yang akan menjadikan konselor menggunakan secara penuh keparannya dengan dukungan struktur, waktu, dan sumberdaya.

Keterlibatan konselor tidak hanya sebatas layanan langsung kepada siswa dan orangtua, melainkan juga dalam menentukan kebijakan pendidikan baik di tingkat sekolah, wilayah, maupun nasional. Dukungan legislatif di tingkat nasional maupun wilayah diperlukan untuk menempatkan bimbingan dan konseling sebagai program yang sejajar dan komplementer dengan program lain. Kebijaksanaan masa lalu untuk memperkuat pekerjaan konselor di dalam bimbingan dan konseling komprehensif adalah misi yang harus diwujudkan pada hari ini dan esok.

### **Langkah-Langkah Penegasan Identitas Profesi**

Sejarah menunjukkan terjadinya ragam pemaknaan dan pemahaman terhadap bimbingan dan konseling, dan memperhadapkan konselor kepada konflik, ketidak konsistenan, dan ketidak kongruenan peran. Untuk mempersempit kesenjangan semacam ini perlu ada langkah penguatan dan penegasan peran dan identitas profesi. Langkah-langkah tersebut adalah:

#### **1. Memahami Para Kepala Sekolah**

Diyakini bahwa dukungan kepala sekolah dalam implementasi dan penanganan program bimbingan dan konseling, di sekolah, sangat esensial. Hubungan antara kepala sekolah dengan konselor sangat penting terutama di dalam menentukan keefektifan program. Kepala sekolah yang memahami dengan baik profesi bimbingan dan konseling akan:

- a. memberikan kepercayaan kepada konselor dan memelihara komunikasi yang teratur dalam berbagai bentuk
- b. memahami dan merumuskan peran konselor
- c. menempatkan staf sekolah sebagai tim atau mitra kerja

*ARAH DAN TANTANGAN*

2. Membebaskan konselor dari tugas yang tidak relevan  
Masih ada konselor sekolah yang diberi tugas mengajar bidang studi, bahkan mengurus hal-hal yang tidak relevan dengan bimbingan dan konseling, seperti jadi petugas piket, perpustakaan, koperasi, dsb. Tugas-tugas ini tidak relevan dengan latar belakang pendidikan, dan tidak akan menjadikan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara profesional.
3. Mempertegas tanggung jawab konselor  
Sudah saatnya menegaskan bahwa bimbingan dan konseling menjadi tanggung jawab dan kewenangan konselor. Sebutan guru pembimbing sudah harus diganti dengan sebutan konselor (sebagaimana sudah ditegaskan dalam UU No. 20/2003). Perlu ditegaskan bahwa konselor adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling dan memperoleh latihan khusus sebagai konselor, dan memiliki lisensi untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Pemberian kewenangan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling didasarkan kepada lisensi dan kredensialisasi oleh ABKIN, sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.
4. Membangun standar supervisi  
Tidak terpenuhinya standar yang diharapkan untuk melakukan supervisi bimbingan dan konseling membuat layanan tersebut terhambat dan tidak efektif. Supervisi yang dilakukan oleh orang yang tidak memahami atau tidak berlatar belakang bimbingan dan konseling bisa membuat perlakuan supervisi bimbingan dan konseling disamakan dengan perlakuan supervisi terhadap guru bidang studi. Akibatnya balikan yang diperoleh konselor dari pengawas bukanlah hal-hal yang substantif tentang kemampuan bimbingan dan konseling melainkan hal-hal teknis administratif. Supervisi bimbingan dan konseling mesti diarahkan kepada upaya membina keterampilan profesional konselor seperti: memahirkan keterampilan konseling, belajar bagaimana menangani isu kesulitan siswa, mempraktekan kode etik profesi, mengembangkan program komprehensif, mengembangkan ragam intervensi psikologis, dan melakukan fungsi-fungsi relevan lainnya.

### **Model Identitas Profesi Yang Ditawarkan**

Identitas profesi menyangkut standar profesi. Ada tiga hal utama dalam standar profesi yaitu etik, sertifikasi dan akreditasi, dan kredensialisasi, dengan landasan epistemologi yang jelas.

#### ***Epistemologi***

Konseling menyangkut proses perkembangan manusia yang berlandaskan kepada hakikat manusia itu sendiri. Konseling banyak mengandung isu filosofis; isu itu sendiri tak pernah berubah, melainkan mungkin titik pandang atau cara pandang terhadap isu itu yang berubah. Proses konseling adalah proses yang berpijak dan bergerak ke arah yang selalu mengandung persoalan filosofis. "*Philosophical counseling' refers to a process in which a counselor (note: apparently not necessarily a philosopher) works with a client to critically reflect on the ideas and world-views associated with the specific life-problems ... preliminarily defined by the client .... These life problems must arise from philosophical problems in the implicit world-view of the client.*" (Shlomit C. Schuster, 1999).



Seorang konselor harus berpegang pada filosofi yang jelas, namun dia tetap harus menghindarkan diri dari faham “completism” (suatu perasaan yang memandang diri “Saya adalah seorang konselor, bersertifikat dan terdidik, sekali jadi, untuk segalanya”. Isu filosofis dalam konseling perlu didiskusikan sebagai sebuah kenyataan karena pemahaman atau cara pandang terhadap isu ini akan menentukan bagaimana sosok konselor dikembangkan dan bagaimana konselor membantu klien. Pikiran lama namun masih tetap relevan dan menarik untuk dikaji adalah isu- isu filosofis konseling yang menyangkut aspek: pribadi konselor, religius, hakikat manusia, tanggungjawab konselor, dan pendidikan konselor. (Dugald S. Arbuckle, 1958). Isu *pribadi* konselor menyangkut hingga mana hubungan antara konsep diri dan tujuan konselor, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan adalah sesuatu yang berorientasi filosofis, dan metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut akan diwarnai oleh filosofi konselor. Metode dan teknik konseling merupakan refleksi dari filosofi konselor. Isu *religius*, hingga mana keyakinan (agama) yang dianut konselor mempengaruhi hubungan konselor dengan klien. Apakah harus ada kesamaan agama antara konselor dengan klien. Dapatkah konselor bertindak sama terhadap klien walaupun berbeda keyakinan? Isu *hakikat manusia*, terkait dengan isu religius dan menyangkut bagaimana konselor memandang manusia. Pandangan ini akan terrefleksikan dalam bagaimana konselor memperlakukan klien dalam proses konseling. Isu *tanggung jawab*, terkait dengan konsep peran konselor di dalam masyarakat dan persoalan konfidensialitas. Haruskah konselor berpikir sebagai menjadi klien dan oleh karena itu dia tidak akan pernah membuka informasi yang konfidensial? Jika kepribadian konselor terefleksikan di dalam metode dan teknik, jika orientasi religius dan pandangan konselor tentang hakikat manusia mempengaruhi pendekatan yang digunakan, **bagaimana bimbingan dan konseling bisa menjadi pekerjaan atau tugas-tugas profesional?**

Karena interaksi konselor dengan klien merupakan wujud komitmen filosofisnya, konselor harus bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan epistemologis, yaitu: (1) Apakah manusia mengetahui dunia ekstramental atau hanya mengetahui duniannya sendiri? (2) Apakah pengetahuan tentang manusia merepresentasikan secara valid tentang dunia ekstramental?, (3) Dapatkah manusia mencapai kesepakatan tentang hakikat kenyataan ekstramental?.(Daubner & Daubner, 1969). Ada tiga posisi konselor atas pertanyaan epistemologis ini, yaitu (Daubner & Daubner, 1969): (a) posisi realis, yang meyakini bahwa ekstramental itu ada dan manusia dapat mencapai pengetahuan yang valid tentang dunia ekstramental, berbagai observasi bisa mencapai kesepakatan, (b) posisi fenomenalis, yang meyakini bahwa dunia ekstramental itu ada tapi tak seorangpun bisa memperoleh pengetahuan valid, dan tidak bisa juga dicapai kesepakatan, (c) posisi fenomenalis individual

Dalam konteks keilmuan saya memandang bimbingan dan konseling ada dalam wilayah ilmu normatif, dengan fokus kajian utama bagaimana memfasilitasi dan membawa manusia berkembang dari kondisi apa adanya (*what it is*) kepada bagaimana seharusnya (*what should be*). Layanan bimbingan dan konseling adalah *layanan psikologis dalam suasana pedagogis*, dia adalah *layanan psikopedagogis*, dalam setting persekolahan maupun luar sekolah, dalam konteks kultur, nilai, dan religi yang diyakini klien dan konselor. Keyakinan filosofis dan keilmuan ini menjadi dasar legal bagi bimbingan dan konseling masuk ke dalam wilayah layanan psikologis dalam suasana pdagogis; menjadi dasar legal bagi seorang konselor memasuki dunia layanan psikologis. Karena sifat normatif pedagogis ini maka fokus orientasi bimbingan dan konseling adalah pengembangan perilaku yang seharusnya dikuasai oleh individu untuk jangka panjang; menyangkut ragam proses perilaku pendidikan, karir, pribadi, keluarga, dan proses pengambilan keputusan. Seorang konselor hendaknya memiliki kemampuan untuk memahami gambaran perilaku individu masa depan, dan konselor harus datang lebih awal memasuki dunia klien.

### ***Kompetensi***

Pertanyaan epistemologi, posisi keilmuan, dan fokus kajian bimbingan dan konseling membawa implikasi bagi pengembangan kompetensi yang harus dikuasai konselor. Kompetensi adalah sebuah kontinum perkembangan mulai dari proses kesadaran (*awareness*), akomodasi, dan tindakan nyata sebagai wujud kinerja. Sebagai suatu keutuhan, kompetensi konselor merujuk kepada penguasaan konsep, penghayatan dan perwujudan nilai, penampilan pribadi yang bersifat membantu, dan unjuk kerja profesional yang akuntabel. Kompetensi konselor mesti dibangun dari landasan filosofis tentang hakikat manusia dan kehidupannya sebagai makhluk Allah Yang Maha Kuasa, pribadi, dan warga negara yang ada dalam konteks kultur tertentu, jelasnya kultur Indonesia. Konselor adalah pendidik, karena itu konselor harus berkompoten sebagai pendidik. Konselor adalah seorang profesional, karena itu layanan bimbingan dan konseling harus diatur dan didasarkan kepada regulasi perilaku profesional, yaitu Kode Etik. Seorang konselor profesional perlu memiliki kesadaran etik karena di dalam memberikan layanan kepada siswa (manusia) maupun dalam kolaborasi dengan pihak lain akan selalu diperhadapkan kepada persoalan dan isu-isu etis dalam pengambilan keputusan untuk membantu individu.

Konselor bekerja dalam berbagai seting, dan itu menjadi kekhususan dari wilayah layanan bimbingan dan konseling. Keragaman seting pekerjaan konselor ini mengandung makna adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan bersama yang harus dikuasai oleh konselor dalam seting manapun. Kompetensi ini disebut kompetensi utama minimal, sebagai kompetensi bersama (*common competencies*), yang harus dikuasai oleh konselor sekolah, perkawinan, karir, traumatik, rehabilitasi, dan kesehatan mental. Setiap seting bimbingan dan konseling menghendaki kompetensi khusus yang harus dikuasai konselor untuk dapat memberikan layanan dalam seting/wilayah khusus itu. Kompetensi ini disebut kompetensi inti atau kompetensi khusus (*core/specific competencies*).

Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, konselor berperan dan berfungsi sebagai seorang pendidik psikologis (*psychological educator/psychoeducator*), dengan perangkat pengetahuan dan keterampilan psikologis yang dimilikinya untuk membantu individu mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Peran ini merepresentasikan sebuah tantangan yang dapat memperkuat tujuan-tujuan keilmuan dan praktek profesional konselor sebagai layanan yang menunjukkan keunikan dan kebermaknaan tersendiri di dalam masyarakat. Sebagai seorang pendidik psikologis, konselor harus kompeten dalam hal:

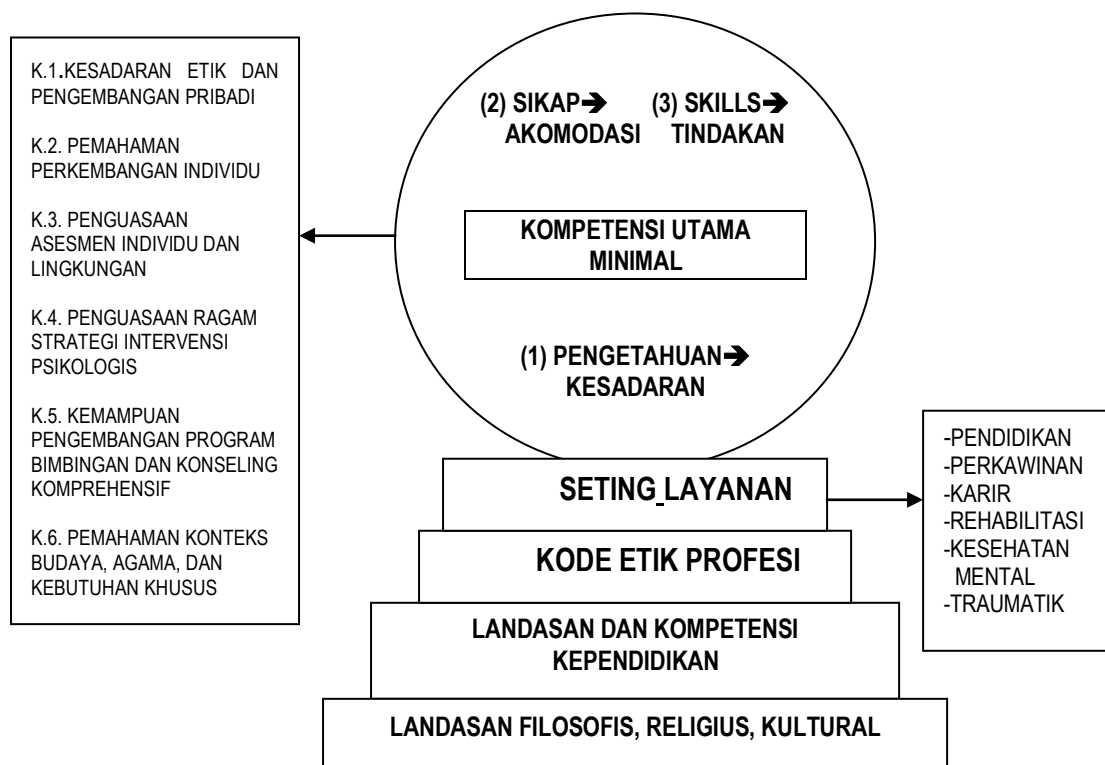
1. Memahami kompleksitas interaksi individu-lingkungan dalam ragam konteks sosial budaya. Ini berarti seorang konselor harus mampu mengakses, mengintervensi, dan mengevaluasi keterlibatan dinamis dari keluarga, lingkungan, sekolah, lembaga sosial dan masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keberfungsian individu di dalam sistem.
2. Menguasai ragam bentuk intervensi psikologis baik antar maupun intrapribadi dan lintas budaya. Kemampuan menguasai teknik-teknik treatment tradisional yang terdiri atas konseling individual dan kelompok harus diperluas ke arah penguasaan teknik-teknik konsultasi, pelatihan, dan pengembangan organisasi.
3. Menguasai strategi dan teknik asesmen yang memungkinkan dapat difahaminya keberfungsian psikologis individu dan interaksinya di dalam lingkungan.
4. Memahami proses perkembangan manusia secara individual maupun secara sosial. Sebagai seorang profesional, konselor harus mampu mengkonseptualisasikan dan memfasilitasi proses pertumbuhan melalui pengembangan interaksi optimal antara individu dengan lingkungan. Konselor harus bergerak melintas dari konsep statik tentang “kecocokan individu-lingkungan” ke arah “alur individu-lingkungan”, yang

menekankan kepada keterikatan pengayaan pertumbuhan antara individu dengan suatu lingkungan belajar.

Implikasi dari pergeseran ini adalah bahwa asesmen tradisional yang menekankan kepada pemahaman intrapsikis, simptom dan sindrome, yang bersifat psikopatologis bukanlah sebagai prioritas utama. Prioritas tinggi terletak pada asesmen pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu, pengalaman tersupervisi dalam hal layanan konsultasi, pelatihan, pengembangan organisasi, riset dalam keberfungsian keluarga, dan perkembangan *life span*, di samping konseling individual dan kelompok.

5. Memegang kokoh regulasi profesi yang terinternalisasi ke dalam kekuatan etik profesi yang mempribadi.
6. Memahami dan menguasai kaidah-kaidah dan praktek pendidikan

Secara skematik landasan pemikiran di atas dituangkan ke dalam Bagan 1, Struktur Kompetensi Konselor. Rumpun komepetnsi K.1. s.d K.6. adalah Kompetensi Utama Minimal yang harus dikuasai oleh Sarjana Bimbingan dan Konseling sebagai konselor. Kompetensi kependidikan tidak dirumuskan dalam rumusan ini, dan merujuk kepada kompetensi bersama yang harus dikuasai oleh para Sarjana Pendidikan.



**Bagan 1. STRUKTUR KOMPETENSI KONSELOR**

***Etik***

Kekuatan dan eksistensi suatu profesi muncul dari kepercayaan publik (*public trust*). Masyarakat percaya bahwa layanan yang diperlukannya itu hanya dapat diperoleh dari orang yang dipersepsikannya sebagai seorang yang berkompeten untuk memberikan layanan itu. *Public trust* akan menentukan definisi profesi dan memungkinkan anggota profesi berfungsi

*ARAH DAN TANTANGAN*

dalam cara-cara profesional. Public trust akan melanggengkan profesi, karena dalam *public trust* terkandung keyakinan publik bahwa profesi dan para anggotanya itu:

- (a) memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi. Kompetensi ini diuji melalui pendidikan formal atau ujian khusus sebelum memasuki dunia praktek profesional. Para profesional dipersyaratkan untuk menunjukkan kelanggengan kompetensinya yang dibuktikan melalui ujian periodik;
- (b) ada perangkat aturan untuk mengatur perilaku profesional dan melindungi kesejahteraan publik. Aspek penting dalam hal ini adalah kepercayaan :
  - (1) adanya kodifikasi perilaku profesional sebagai aturan yang mengandung nilai keadilan dan kaidah-kaidah perilaku profesional yang tidak semata-mata melindungi anggota profesi tetapi juga melindungi kesejahteraan publik.
  - (2) bahwa anggota profesi akan mengorganisasikan dan bekerja dengan berpegang kepada standar professional conduct. Diyakini bahwa seorang profesional akan menerima tanggung jawab mengawasi dirinya sendiri; mampu melakukan self regulation. Dua aspek penting dari self regulation adalah: (i) melahirkan sendiri kode etik, dan (ii) standar praktek
- (c) anggota profesi dimotivasi untuk melayani orang-orang dengan siapa mereka bekerja. Keyakinan ini barangkali paling rawan; menyangkut komitmen seorang profesional terhadap nilai yang melintasi nilai-nilai kepentingan pribadi dan motivasi finansial.

Pertanyaan etik tentang profesi berakar pada public trust yang mendefinisikan profesi itu dan menjadi kepedulian utama seluruh anggota kelompok profesional. Setiap saat perspsi publik terhadap profesi dapat berubah karena perilaku tidak etis, tak profesional atau tak bertanggungjawab dari para anggotanya. Seorang konselor profesional mesti menaruh kepedulian khusus terhadap klien, karena klien amat rawan untuk dimanipulasi dan dieksploitasi. Etika konseling harus melibatkan kesadaran dan komitmen untuk memelihara pentingnya tanggung jawab melindungi kepercayaan klien (*client trust*). Seorang konselor harus menyadari akan kemungkinan pengaruh tindakannya terhadap status klien pada saat ini dan yang akan datang, dan harus mampu membuat judgment moral/etik.

Kode etik suatu profesi muncul sebagai wujud self-regulation dari profesi itu. Suatu organisasi profesi harus mengembangkan kode etik secara fair. Kode etik merupakan aturan yang *melindungi* profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal di dalam suatu profesi, dan melindungi/ mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktek. Kode etik profesional merupakan variabel kognitif yang penting yang akan mempengaruhi pertimbangan etis dari seorang (konselor) profesional. Kode etik menyiapkan panduan berkenaan dengan parameter etik profesi.

Kode Etik Konselor Indonesia yang telah dirumuskan dan disepakati, yang perlu terus disempurnakan, memerlukan penegasan dalam implementasi dan supervisi. Penegasan identitas profesi bimbingan dan konseling harus diwujudkan dalam implementasi kode etik dan supervisinya. ABKIN harus dan akan segera menetapkan penerapan kode etik bagi para konselor di dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan layanan profesional kepada masyarakat, disertai supervisi berdasarkan standar yang disepakati.

### ***Sertifikasi dan Akreditasi***

Predikat konselor didasarkan atas sertifikasi yang dimiliki seseorang. Sertifikasi diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam program yang disiapkan secara khusus untuk itu. Program studi Bimbingan dan Konseling yang ada di LPTK adalah program yang terakreditasi dan berwenang menyiapkan tenaga konselor profesional. Kelayakan sebuah lembaga penyelenggara pendidikan konselor didasarkan pada hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional bersama-sama dengan ABKIN. Keterlibatan ABKIN dalam melakukan akreditasi dipandang penting karena ABKIN adalah institusi yang menetapkan kompetensi profesional yang harus dicapai melalui program pendidikan konselor di LPTK. Dengan sertifikasi dan akreditasi ini pekerjaan bimbingan dan konseling akan menjadi profesional karena hanya dilakukan oleh konselor profesional yang bersertifikat.

### ***Kredensialisasi***

Kredensialisasi adalah penganugerahan kepercayaan kepada konselor profesional yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan dan memperoleh lisensi untuk menyelenggarakan layanan profesional secara independen kepada masyarakat maupun di dalam lembaga tertentu. Lisensi diberikan oleh ABKIN atas dasar permohonan yang bersangkutan, berlaku untuk masa waktu tertentu dan dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan apakah lisensi masih bisa diberikan. Pemberian lisensi diberikan atas hasil asesmen nasional yang dilakukan ABKIN melalui **Badan Akreditasi dan Kredensialisasi Konselor Nasional**. Seorang konselor tidak secara otomatis memperoleh kredensial, kecuali atas dasar permohonan dan melakukan secara nyata layanan profesi bagi masyarakat atau sekolah.

Untuk kepentingan kredensialisasi pada masa transisi ini ABKIN merancang pola kredensialisasi seperti berikut:

1. Para Guru Besar dan Doktor Bimbingan dan Konseling yang memiliki latar belakang Sarjana/S1 dan S2 Bimbingan dan Konseling diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan kredensial, dengan melalui asesmen sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan ABKIN. Kelompok ini dapat menyelenggarakan layanan independen di masyarakat.
2. Para konselor profesional lulusan Program Pendidikan Profesi Konselor diberikan kredensial atas dasar permohonan melalui asesmen yang ditetapkan ABKIN. Kelompok ini dapat menyelenggarakan layanan independen di masyarakat.
3. Para lulusan Magister Pendidikan (S2) dalam bidang bimbingan dan konseling dengan latar belakang S1 bimbingan dan konseling, dapat memperoleh lisensi setelah melakukan layanan kemasyarakatan dalam periode waktu tertentu dan melalui asesmen khusus.
4. Para lulusan program S1 Bimbingan dan Konseling diberi kewenangan khusus untuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
5. Para lulusan S2 Bimbingan dan Konseling yang berlatar belakang S1 bukan bimbingan dan konseling tidak diberikan lisensi sebagai konselor tapi bisa diberi kewenangan sebagai guru pembimbing .
6. Para lulusan S3 (Doktor) Bimbingan dan Konseling dengan latar belakang S2 Bimbingan dan Konseling tapi bukan berasal dari S1 bimbingan dan konseling bisa dipertimbangkan memperoleh lisensi setelah melaksanakan layanan profesional tersupervisi dan melalui asesmen khusus.

Pola tersebut perlu dikaji dan dituangkan dalam sistem kredensialisasi dan menjadi standar nasional.

*ARAH DAN TANTANGAN*

## **Rujukan**

*ARAH DAN TANTANGAN*

Arbuckle, Dugald S. (1958). "Five Philosophical Issues in Counseling". dalam Beck. Carlton E. (1971). *Philosophical Guidanlines for Counseling*. WM.C. Brown Co. Pub. Iowa. 13-17.

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. "Kode Etik Konselor Indonesia".

----- (2004). *Arah Kebijakan Pengembangan dan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia*.

Biggs, Dolad A & Blocher, Donald H. (1986). *The Cognitive Approach to Ethical Counseling*. SUNY at Albany.

Bloom, John W. (1996). *Credentialing Professional Counselor for the 21<sup>st</sup> Century*.

NBCC&ERIC/CASS.

Daubner, Edith Schell & Daubner, Edward (1969). "Epistemology and School Counseling". dalam Beck. Carlton E. (1971). *Philosophical Guidanlines for 17*

Kartadinata, Sunaryo. (1996). *Kerangka Kerja Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan, Pendekatan Ekologis Sebagai Suatu Alternatif*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. IKIP Bandung.

----- (2003). "Kebijakan, Arah dan Strategi Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling di Indonesia." Konvensi Nasional XIII Bimbingan dan Konseling, Bandung, 8-10 Desember 2003.

----- (2004). "Standarisasi Profesi Konseling di Indonesia." Konvensi Nasional.

Divisi-Divisi ABKIN, Malang 12-13 Agustus 2004.

----- (2004). "Revitalisasi Bimbingan dan Konseling sebagai Profesi dan Strategi Pengembangannya." Seminar Profesi Konselor Masa Depan, Bandung, 2 Agustus 2004.

----- (1999). "Quality Improvement and Management System Development". *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Dec. 1999. Vol. 6. h. 413-423.

----- (2001). "Reaktualisasi Paradigma Bimbingan dan Konseling dan Profesionalisasi Konselor". *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Mei 2001, Vol. IV No. 7, h. 3-17.

Johnson, Clarence D. & Johnson, Sharon. "Competency-Based Guidance: A System Approach." Adapted from Johnson C. & Johnson, S. (1991). "The New Guidance: A System Approach to pupil personnel program". California ACD Journal, 11, 5-14.

Lambie, Glenn W. & Williamson, Laurie L. (2004). "The Challenge to Change from Guidance and Counseling to Professional School Counseling: a historic proposition". *Professional School Counseling*, Dec, 2004.

Tyler Leona. (1999). "The Nature of Developmental Counseling: An Overview". Chapter.